



RANCANGAN AKHIR RENJA

Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
2026

 021-875594 Fax 021-875594

 disperdagin@bogorkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dapat disusun dengan baik. Dokumen Renja merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pemerintah yang sesuai dengan bidang urusan yang dituju.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 memuat hasil evaluasi kinerja tahun lalu (n-2).

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses penyusunan perencanaan, khususnya urusan perdagangan dan perindustrian. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2026.

Demikian Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor tahun 2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan dan pengembangan bidang urusan perdagangan dan industri di Kabupaten Bogor.

Cibinong, Juli 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR,**



ARIF RAHMAN, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19750723 200212 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
Tujuan disusunnya Renja adalah:.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II 14	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023	14
2.1. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	91
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	94
2.5. Penelaahan Urusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat....	129
BAB III 130	
TUJUAN DAN SASARAN	130
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	130
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	130
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	144
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	145
BAB IV 156	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	156
4.1 Program/Kegiatan untuk Tahun 2026	156
BAB V 188	
PENUTUP	188

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

**RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah strategis dalam hal perkembangan pemerintahan, perekonomian, sosial masyarakat dan sosial politik. Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai daerah penyangga Ibu Kota, pendukung perekonomian, perdagangan, industri, jasa perbankan dan keuangan, perkembangan budaya. Sebagaimana hasil sensus nasional, roda perekonomian Indonesia didominasi oleh tiga sektor usaha, antara lain perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, serta industri pengolahan.

Dalam skala nasional, sektor perdagangan besar dan eceran adalah salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) non pertanian terbesar di Indonesia; terbesar kedua setelah industri pengolahan. Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang vital dalam distribusi barang kebutuhan hidup semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu, usaha perdagangan besar dan eceran juga menjadi pencipta lapangan kerja paling besar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perencanaan strategis yang optimal dalam menghadapi kondisi tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 23

Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Renja Tahun 2026 disusun dengan mengakomodir kondisi dan Kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah yang berlaku untuk Tahun 2026. Untuk itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus dilakukan secara serius terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2026, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh target indikator yang menjadi ukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan representasi dari pelaksanaan pendekatan perencanaan partisipatif, teknokratik, politis, bottom-up dan top-down yang disinergikan dengan target kinerja/prioritas pembangunan pusat dan Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 sekaligus merupakan rencana kerja tahun pertama pada periode perencanaan jangka menengah tahun 2024-2026. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan hingga akhir periode, diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Persiapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah disusun melalui beberapa tahapan, yaitu

- 1) Persiapan Penyusunan Renja PD
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
- 3) Penyusunan Rancangan Renja PD
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
- 6) Penetapan Renja PD
- 7) Renja Final

Merujuk pada tema pembangunan Kabupaten Bogor yaitu **“Penguatan Data Digital dalam Pelayanan Publik”**, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor mendukung **Misi ke-2** yaitu

”Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju” dengan Tujuan Daerah
” Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah” dan Sasaran Daerah
”Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan
tersier)”.

Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dinas Perdagangan Kabupaten Bogor sebagai *leading sector* bidang perekonomian ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan sector perdagangan dan sector industry serta mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2026 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 7 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
40. Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat adalah Pergub Jawa Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat adalah Pergub Jawa Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah Tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2024 dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja.

Sistematika penulisan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026, landasan hukum, maksud dan tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan visi, misi dan tema pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap RKPD Tahun 2022, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan Kebijakan Nasional, dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pada bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

2.1. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan. Pengukuran laporan kinerja ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b) Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik fisik maupun non fisik.
- c) Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki Tujuan dan Sasaran Sebagai Berikut:

- a) Indikator Tujuan:
 - 1) Nilai PDRB Perdagangan
 - 2) Nilai PDRB Industri Pengolahan
- b) Indikator Sasaran:
 - 1) Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri
 - 2) Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor
 - 3) Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten

- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang
Urusan Perindustrian dan Perdagangan
- 5) Proporsi Industri Kecil Menengah pada tingkat Kabupaten

Secara lengkap Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Table 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	2020									
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA)	Eksportir	328						
		Jumlah sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga	unit	5						
0001	Pembinaan Usaha Sarana Perdagangan	- Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	orang	1060						
0002	Pembangunan Sarana Perdagangan	Jumlah Pasar	Pasar	1						
		Jumlah Rest rea	Rest Area	1						
0003	Pengadaan dan Penyaluran Barang Beredar	Terdatanya data perkembangan harga; Terkendalnya harga kebutuhan pokok; Tersedianya stock kebutuhan pokok di pasar	Unit	5						
0004	Kegiatan Ekspor Impor dan Promosi Perdagangan	Jumlah pelaku Usaha	orang	400						
		Jumlah Pameran	Kali	1						
1001	PENYEDIAAN FASILITAS PENUNJANG PROTOKOL KESEHATAN PADA PASAR RAKYAT (DID TAMBAHAN)		Pasar	20						

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
1002	Pengadaan Hand Sanitizer Dan Masker Untuk PKI Disekitar Kawasan Puncak (Hibah Pariwisata)	Jumlah Hand Sanitizer dan Masker	buah	2700						
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	Presentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku	%	78,64						
0001	Kegiatan Bina Tata Niaga	Terbinanya pelaku usaha dan konsumen	orang	5565						
0002	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Tata Niaga dan Kemetrolgian		Orang	80						
0003	Kegiatan Pelayanan Kemetrolgian	Jumlah Alat Kerja	Unit	18						
		Jumlah Peserta Bimtek	orang	100						
		Jumlah Kecamatan	Kecamatan	40						
		Jumah Alat UTTP	unit	188.869						
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH-CHT)	Jumlah Publikasi di Kecamatan	Kecamatan	40						
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah Komoditi unggulan IKM	Jenis	5						
		Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM	IKM	500						
0001	Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dibina	orang	500						

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
0002	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan	IKM	725						
0003	Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi	IKM	650						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	95						
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai	%	100						
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100						
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97						
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	94						
0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Jenis	3						
0002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Majalah	Jenis	11						
0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tabung Pemadam	Tabung	27						

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
0004	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan dan Minum	Jamuan	2825						
0050	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	3						
0051	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1						
0052	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah Personil Keamanan Kantor	orang	23						
0053	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Personil Kebersihan Kantor	orang	19						
0054	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit	28						
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit	1						
0203	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung	Jenis	7						
0351	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung	Gedung	2						
0354	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit	28						
0355	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Gedung	Gedung	2						
0356	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Jenis	3						
0357	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Jaringan	Jaringan	1						

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
0450	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kegiatan	51						
1000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Personil	orang	2						
1001	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah Pertemuan Kajian dan Olah raga	Kali	66						
1003	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	1						
1004	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Orang	orang	14						
2001	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1						
2002	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1						
2003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	5						
2004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen	Dokumen	6						
2007	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	2						
2008	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tayangan Publikasi	Kali	20						

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	2021 & 2022									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPI /SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%		61,48	97,57				
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	%		100	100				
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang dikeluarkan	BAP		100	125				
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	%		100	100				
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi	Pelaku Usaha		50	75				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Terfasilitasinya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	%		100	100				
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	BAP		50	75				
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	BAP		10	25				
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	%			0				
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	125			0				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	40			0				
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentaser Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan	%			0				
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	BAP			0				
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/ Kota	%			100				
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pelaku usaha yang diperiksa terkait penyimpanan barang berbahaya	Pelaku Usaha			20				
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Pelaku usaha yang diperiksa terkait distribusi bahan berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Pelaku Usaha			20				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi terkait Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pelaku Usaha			20				
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%		100	100				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA)	eksportir		50	55				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang dibina	%		33,33	33				
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%		6,67	23,38				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dibangun	unit		2	5				
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi pasar bersih dan	unit			2				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		bersertifikat SNI								
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	%		48,67	61,7				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi yang dibina menjadi pasar bersih	Orang		25	35				
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi yang dibina	Orang		30	35				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	%		60	80,93				
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%		10	18				
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Data perkembangan harga barang kebutuhan pokok di pasar	Dokumen		1	1				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Daftar harga dan stok barang pokok dan penting per bulan	laporan		1	1				
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi sasaran pada pelaksanaan operasi pasar	orang		800	1				
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Barang Pokok dan Barang penting yang tersedia	Jenis			10				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dokumen			1				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Dokumen Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dokumen			12				
	Jumlah Dokumen Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Jumlah Dokumen Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Dokumen			17500				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Rakyat	Rakyat								
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Jenis		5	5				
			Ton		44057	23.957				
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Data pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jenis		5	10				
			Ton		44000					
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Data penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Jenis Ton		5	5				
			Ton		44000					
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan	Pelaku Usaha		5	5				
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD		170872 0834	17711 09022				
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)	Jumlah Pameran dan Misi dagang yang berorientasi ekspor	Pameran		1	1				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Daerah Kabupaten/Kota									
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	Pelaku Usaha		25	40				
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Pelaku Usaha		25	1				
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional yang di ikuti	Pameran			1				
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang di ikuti	Pameran			25				
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah konsesi dagang yang dihasilkan	Konsesi							
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang fasilitasi	pelaku usaha			80				
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah jenis dan nilai produk dalam negeri yang di pasarkan	jenis		1	1				
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi, pemasaran dan Peningkatan produk dalam negeri	Pelaku Usaha		1	1				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penggunaan Produk Dalam negeri	Promosi		1	1				
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang Dipasarkan	Produk		10	40				
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Sistem							
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%		79,0400 1248	89,73				
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	UTTP		124404 2	10762 59				
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dan diawasi	UTTP		124404 2	10762 59				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	BDKT		500	500				
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan metrologi	Pelaku Usaha		240	240				
	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan penyelidikan metrologi legal	kasus							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%		50	80				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK, sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%		50	50				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana industri yang dibangun	Unit		1	1				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Pelaku Usaha		1	1				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri	Dokumen			1				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen			1				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen			1				
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Dokumen			1				
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%		0,7	0,88				
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			20	20				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			100	100				
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota			100	100				
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUK.I) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota 2. Persentase Jumlah izin yang terbitkan usaha industri (IUI) kecil dan JUI menengah yang diterbitkan 3. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	%		100	100				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	BAP		30	30				
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pelaku Usaha		100	100				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen		4	1				
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	'Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%		5	5				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		1	2				
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah informasi industri	Kali		10	12				
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan dievaluasi	Pelaku Usaha		0	150				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100	100				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen		3	3				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	dokumen		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen		1	1				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Perubahan RKA-SKPD									
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD	dokumen		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen		1	1				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		2	2				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	dokumen		6	6				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai	bulan		12	12				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		1	1				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	dokumen		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen		1	1				
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen		1					

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dokumen		1	1				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen		1	1				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prsentase pendapatan retribusi	%							
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pengelola retribusi daerah	dokumen							
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	dokumen							
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah yang terselenggara	kali							
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen objek Retribusi Daerah yang didata	dokumen							
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pengolahan retribusi daerah	dokumen							
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah	dokumen							
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan retribusi daerah	dokumen							

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Data Barang Milik Daerah	dokumen		1	1				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen		1					
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang didata	dokumen		1					
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang didata	dokumen							
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang didata	dokumen							
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	dokumen			1				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	dokumen			1				
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	Kali		0					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilayani	Pegawai		70	70				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggara	kali		4	4				
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan disiplin	orang			1				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stell							
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian	dokumen							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun									
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas									
	Pemindahan Tugas ASN									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggara	kali			5				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	dokumen		1	1				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	Jenis		10	10				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah tangga	Jenis		5	5				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Alat Rumah tangga	Jenis		4	3				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Snack yang tersedia	Porsi		50	2				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dalam dan luar daerah	Kali		5	2				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis			3				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah	jenis			3500				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang tersedia	jenis			20				
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinas	kali			1				
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pendukung pemerintahan	sistem			1				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan			2	2				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat Menyurat SKPD	Jenis		4	4				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang dibayarkan	bulan		12	12				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan	unit		15	15				
		Jumlah Non PNS	orang		67	67				

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Satpam dan Penjaga Malam	orang		7	7				
		Jumlah Tenaga Administrasi	orang		2	2				
		Jumlah Tenaga Kebersihan	orang		13	13				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah/jenis barang yang dipelihara	Jenis		33	33				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	unt		33	33				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	unt		33	33				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	gedung		2	3				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			0					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			0					

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	set							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	unit			4				
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipelihara	jenis							
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	jenis							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah/jenis barang yang diadakan	unit/jenis			6				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit							
	Pengadaan Alat Besar									
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	set			3				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	unit			1				
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
	Pengadaan Aset Tak Berwujud									

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	unit			2				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	2023 & 2024									
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Perdagangan									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPI /SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/SIUP Toko Swalayan)					98,34	66,00	66,00	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan					100,00	100,00	100,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang dikeluarkan								
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					150,00	50,00	50,00	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1. Persentase penerbitan TDG 2. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG					100,00	100,00	100,00	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi								
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang					100,00	50,00	50,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu					99,94	100,00	100,00	
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)								
		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik					25,00	20,00	20,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)					25,00	20,00	20,00	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu					-	-	-	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)					-	-	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)					-	-	-	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentaser Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan								
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri					25,25	25,00	25,25	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C					-		-	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu						100,00		
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)								
		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri						5,00		
	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)								
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri						5,00		

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/ Kota					100,00	100,00	100,00	
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pelaku usaha yang diperiksa terkait penyimpanan barang berbahaya								
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya					10,00	20,00	20,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Pelaku usaha yang diperiksa terkait distribusi bahan berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2					10,00	5,00	5,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi terkait Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)					10,00	10,00	10,00	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu					100,00	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA)								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal					3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan					33,33	33,33	33,33	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya					13,33	13,33	13,33	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dibangun					2,00	2,00	2,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi pasar bersih dan bersertifikat SNI								
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					3,00	1,00	1,00	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina					61,95	26,00	-	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi yang dibina menjadi pasar bersih						23,33	23,33	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					1,00			
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi yang dibina						1,00	1,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					1,00			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk					64,40	1,00	1,00	
		IHK Bahan Makanan					-	100,00	100,00	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Barang Pokok dan Barang penting yang tersedia					18,00	106,50	-	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						18,00	18,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					1,00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Dokumen Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						1,00	1,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					1,00			

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Dokumen Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						1,00	1,00	
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					1,00			
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu					7,70	1,00	1,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Data perkembangan harga barang kebutuhan pokok di pasar						8,00	8,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1,00			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Daftar harga dan stok barang pokok dan penting per bulan						1,00	1,00	
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					12,00			

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi sasaran pada pelaksanaan operasi pasar						12,00	12,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1,00	1,00		
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan					5,00	1,00	1,00	
							-	75,00	75,00	
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan						64.502,00	-	
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan					10,00			
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Data pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi						1,00	1,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					1,00			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Data penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi						1,00	1,00	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					1,00			
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)					1.835. 056.10 2	1,00	1,00	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran dan Misi dagang yang berorientasi ekspor					1,00	1.532.650 .000	1.875.427.336	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina					60,00	5,00	5,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang dibina					100,00			
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional yang di ikuti								
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					4,00			
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang di ikuti					4,00	2,00	2,00	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah konsesi dagang yang dihasilkan						2,00	2,00	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal					-			
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang fasilitasi						5,00	5,00	
		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi					5,00			
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah jenis produk dalam negeri yang di pasarkan tahun ke-n					5,00	10,00	10,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi, pemasaran dan Peningkatan produk dalam negeri					10,00	33,33	33,33	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penggunaan Produk Dalam negeri						10,00	10,00	
		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					3,00			
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang Dipasarkan						5,00	5,00	
		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi					50,00		-	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri						5,00	5,00	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan						40,00	40,00	
		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan								
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku					89,59	1,00		
								57,42	57,42	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang 2. Jumlah potensi alat UTTP					1.404.239,00			
								700.000,12	700.000,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dan diawasi								
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					1.718.949,00			
		Jumlah BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku					-	700.000,00	700.000,00	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan metrologi						500,00	-	
	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan penyelidikan metrologi legal								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					350,00			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					100,00	350,00	349,50	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK, sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA					100,00	50,45	50,75	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sarana dan prasarana industri yang dibangun						50,00	50,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					1,00			

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku usaha yang dibina						1,00	1,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					1,00			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri						1,00	1,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					-			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						1,00	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					1,00			

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1,00	1,00	1,00	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					1,00	1,00	1,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten					1,32	3,30	3,30	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UII) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh					20,00	50,00	50,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		instansi terkait								
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					100,00	100,00	100,00	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota					100,00	100,00	100,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUK.I) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota 2. Persentase Jumlah izin yang terbitkan usaha industri (IUI) kecil dan JUI menengah yang diterbitkan 3. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan					100,00	100,00	100,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi					50,00	30,00	30,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		dengan Sistem OSS								
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota					50,00	75,00	75,25	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					1,00	1,00	1,00	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	'Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota					10,00	30,00	30,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					1,00	1,00	1,00	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah informasi industri								
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					1,00	1,00	1,00	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan dievaluasi								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					1,00	1,00	1,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah					100,00	100,00	100,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah					10,00	7,00	7,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3,00	3,00	3,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PERubahan RKA- SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumenLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1,00	12,00	12,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2,00	1,00	1,00	
		Jumlah Publikasi Kinerja						1,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah					6,00	9,00	9,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					67,00	14,00	14,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan SKPD								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1,00	1,00	1,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD					1,00	4,00	4,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1,00	1,00	1,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prsentase pendapatan retribusi								
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pengelola retribusi daerah								
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah yang terselenggara								
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen objek Retribusi Daerah yang didata								
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pengolahan retribusi daerah								
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah								
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan retribusi daerah								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Data Barang Milik Daerah					1,00	11,00	11,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang didata					-	1,00	1,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang didata					-	3,00	3,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang didata					-	3,00	3,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah					-	1,00	1,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD						1,00	1,00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan					-		-	
		Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilayani					70,00	70,00	70,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggara							-	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100,00	65,00	65,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan disiplin Pegawai						1,00	1,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					-		-	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					3,00	2,00	2,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1,00	1,00	1,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun									
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas									
	Pemindahan Tugas ASN									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan yang diselenggara								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10,00	40,00	40,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum					1,00	1,00	1,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1,00	1,00	1,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4,00	4,00	4,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1,00	1,00	1,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat Rumah tangga								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1,00	1,00	1,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Snack yang tersedia								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					50,00	12,00	12,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dalam dan luar daerah								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20,00	4,00	4,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1,00	1,00	1,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					5,00	1,00	1,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang tersedia								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1,00	1,00	1,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinas								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pendukung pemerintahan								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1,00	1,00	1,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan					2,00	3,00	3,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat Menyurat SKPD								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1,00	12,00	12,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang dibayarkan								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12,00	12,00	12,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan								

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1,00	12,00	12,00	
		Jumlah Non PNS					67,00	67,00	67,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
		Jumlah Satpam dan Penjaga Malam					7,00	7,00	7,00	
		Jumlah Tenaga Administrasi					2,00	2,00	2,00	
		Jumlah Tenaga Kebersihan					13,00	13,00	13,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah/jenis barang yang dipelihara					33,00	5,00	5,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					29,00	29,00	29,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					29,00	29,00	29,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2,00	3,00	3,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang					-		-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Mebel yang Dipelihara					-	1,00	-	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara					125,00	10,00	10,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30,00	20,00	20,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipelihara					-		-	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara					-	2,00	-	
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara					3,00	3,00	3,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah/jenis barang yang diadakan					6,00		-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-	1,00	1,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-		-	
	Pengadaan Alat Besar						-		-	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2,00	4,00	4,00	

KOD E	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	2,00	2,00	
							-		-	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						-		-	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud						-		-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2,00	4,00	4,00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pada Tahun Anggaran 2024 rata-rata pencapaian realisasi kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Dinas Perdagangan dan perindustrian, secara lengkap dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

a) Evaluasi capaian kinerja tahun 2024.

a) Capaian Indikator Tujuan

1) Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan adalah salah satu parameter ekonomi yang menggambarkan selisih antara nilai produksi (output) dan biaya antara (biaya yang habis dipakai selama proses produksi) dari suatu produk, baik barang maupun jasa. Nilai NTB sangat penting untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah, yang merupakan penjumlahan dari NTB di semua industri. Berdasarkan hasil laporan evaluasi kinerja triwulan IV Pada akhir tahun 2024 Nilai Tambah Bruto (NTB) perdagangan terealisasi sebesar 38.367.000 (Milyar/Rupiah) dari target 35.840.869 (Milyar/Rupiah) atau dengan tingkat capaian sebesar 107,05%.

2) Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri adalah salah satu parameter ekonomi yang menggambarkan selisih antara nilai produksi (output) dan biaya antara (biaya yang habis dipakai selama proses produksi) dari suatu produk, baik barang maupun jasa. Nilai NTB sangat penting untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah, yang merupakan penjumlahan dari NTB di semua industri. Berdasarkan hasil laporan evaluasi kinerja triwulan IV Pada akhir tahun 2024 Nilai Tambah Bruto (NTB) perindustrian terealisasi sebesar 160.985.000 (Milyar/Rupiah) dari target 151.653.375 (Milyar/Rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 106,15%.

b) Capaian Indikator Sasaran

1) Nilai ekspor adalah parameter untuk menggambarkan pertumbuhan capaian nilai ekspor tahun berjalan yang di bandingkan dengan capaian nilai ekspor tahun n-1 terealisasi

sebesar 2,15% dari target 2,14% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

- 2) Presentase cakupan layanan wajib tera dan tera ulang merupakan gambaran pelaksanaan tera/tera ulang pada 40-kecamatan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024 pelaksanaan tera/tera ulang terealisasi 121,00 % dari target 80,02% dengan tingkat capaian 151,21%.
- 3) Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan merupakan indicator yang menggambarkan ketersesuaian antara RPIK dengan RIPIN dan RIPP. Berdasarkan pencapaian tahun 2024 Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan tersebut tercapai 50,75% dari target 50,45 dengan tingkat capaian 100,59%.

b) Capaian indicator seluruh program

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dari pagu anggaran Rp.19.761.861.548,- terealisasi sebesar 95,93 % dengan nilai sebesar Rp. 19.239.194.474,- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 100% terealisasi 100%.
- 2) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dari pagu anggaran Rp.2.085.615.743.- terealisasi sebesar 97,88 % dengan nilai sebesar Rp.2.041.326.016. sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 66,00 % terealisasi 66,00 % atau 100%
- 3) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dari pagu anggaran Rp.15.063.997.046.- terealisasi sebesar 96,57 % dengan nilai sebesar Rp.14.547.086.741.- sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 33,33% terealisasi 33,33% atau 100%
- 4) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dari pagu anggaran Rp.924.368.364.- terealisasi sebesar 98,87 % dengan nilai sebesar

Rp.913.920.388,- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 100% terealisasi 100%.

- 5) Program pengembangan ekspor dari pagu anggaran Rp.1.360.001.317.- terealisasi sebesar 95,85% dengan nilai sebesar Rp.1.303.559.527.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 1.532.650.000 USD terealisasi 1.875.427.336 USD atau 122,37%
- 6) Program standardisasi dan perlindungan konsumen dari pagu anggaran Rp.1.782.068.168.- terealisasi sebesar 99,77 % dengan nilai sebesar Rp.1.778.039.811.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target persentase 57,42% terealisasi 57,42% atau 100%
- 7) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari pagu anggaran Rp.87.399.552.- terealisasi sebesar 98,42% dengan nilai sebesar Rp.86.021.552.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 33,33 Jenis terealisasi 33,33 Jenis atau 100%
- 8) Program perencanaan dan pembangunan industri dari pagu anggaran Rp.1.958.716.430.- terealisasi sebesar 97,07% dengan nilai sebesar Rp.1.901.320.359.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 50,45% terealisasi 50,75% atau 100,59%
- 9) Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota: dari pagu anggaran Rp.2.037.860.243.- terealisasi sebesar 98,60% dengan nilai sebesar Rp.2.009.430.743.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target persentase 3,3% terealisasi 3,3% atau 100%
- 10) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan target Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini: dari pagu anggaran Rp.1.598.886.046.- terealisasi sebesar 98,21% dengan nilai sebesar Rp.1.570.295.620.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%

- c) Program Kegiatan yang melebihi target kinerja antara lain:
- 1) Program Pengembangan Ekspor, realisasi capaian kinerja dari target 1.532.650.000 USD terealisasi 1.875.427.336 USD atau 121,53%.
 - ✓ Tingginya capaian nilai ekspor Kabupaten Bogor menggambarkan keberhasilan luar biasa dalam mendorong produk lokal ke pasar internasional. Realisasi di atas 100% ini menunjukkan efektivitas strategi promosi ekspor, fasilitasi kepada pelaku usaha, serta peningkatan kapasitas produksi komoditas unggulan di kabupaten tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa eksportir dan pelaku UMKM mampu memperluas pangsa pasar global, meningkatkan volume ekspor, dan mengoptimalkan nilai transaksi. Pencapaian ini tidak hanya memenuhi target, tetapi juga menciptakan momentum baru untuk pertumbuhan ekonomi, memperkuat devisa daerah, dan mendongkrak reputasi produk lokal di pasar global. Ini menjadi pijakan strategis dalam menetapkan target lebih ambisius dan memperluas kapasitas pengembangan ekspor di masa mendatang.
 - 2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, realisasi capaian kinerja dari target persentase 50,45% terealisasi 50,75% atau 100,59%.
 - ✓ Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pendataan, dan pengawasan terhadap sasaran pembangunan industri telah dilakukan dengan cermat, akurat, dan tepat waktu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan instansi terkait menandakan efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan industri daerah. capaian ini mencerminkan stabilitas pelaksanaan program yang tidak mengalami deviasi besar, melainkan berhasil memenuhi semua komponen kegiatan perencanaan industri. Ini juga mencerminkan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik, sehingga target-target kecil di dalam RPIP dapat terlaksana secara penuh dan tuntas.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 101,77% dengan predikat kerja **SANGAT TINGGI**.

Secara lengkap pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4

Table 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)×100%
	<u>TUJUAN</u>								
	Indikator:								
	Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan	Rp. (Juta)	29.562.426	30.594.889	32.391.850	35.486.009	35.840.869	38.367.000	107,05
	Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri	Rp. (Juta)	127.407.557	132.339.360	141.864.330	151.532.005	151.653.375	160.985.000	106,15
	<u>SASARAN</u>								
	Indikator:								
	Nilai ekspor perdagangan (berdasarkan penerbitan SKA)	USD	1.483.214.834						
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha	Pelaku usaha	200						

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	Cakupan pembangunan 5 sentra IKM (Sentra industri kulit: Ciomas Sentra Industri Makanan: Jonggol Sentra Industri Tas: Ciampea Sentra Industri Logam: Citeureup Sentra Industri Alas kaki: Ciomas, Tamansari, Dramaga Sentra Industri Konveksi: Caringin	%	30						
	Cakupan bina IKM	IKM	1.300						
	TUJUAN								
	Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan	Rp. (Juta)	29.562.426	30.594.889	32.391.850	35.486.009	35.840.869	38.367.000	107,05

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	Nilai Tambah Bruto (NTB) Perindustrian	Rp. (Juta)	127.407.557	129.584.167	141.864.330	151.532.005	151.653.375	160.985.000	106,15
	SASARAN								
	Nilai ekspor	%		1	1,19	1,95	2,14	2,15	100,47
	Cakupan wilayah tertib ukur	%		100	100	100	80,02	121	151,21
	Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan	%		40	60	100	50,45	50,75	100,59

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan serta kajian hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan terhadap pencapaian kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas. Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan Perdagangan dan Perindustrian. Maka dari itu perlu disusun isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan tahun yang akan datang. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar pada sector perdagangan dan sector perindustrian

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sampah limbah padat dan kemasan dari pusat perdagangan dan pasar rakyat;
- 2) Penggunaan Energi untuk pengurangan emisi dalam proses produksi industri kecil dan menengah (IKM);
- 3) Penggunaan bahan baku industri pengolahan;
- 4) Penataan, pembinaan dan pendampingan akses kemitraan usaha mikro dengan pasar modern;
- 5) Distribusi barang kebutuhan pokok belum merata;
- 6) Minimnya pasar bersih dan berstandar SNI yang mendukung sanitasi dan pengelolaan limbah;
- 7) Lemahnya daya saing ekspor produk industri lokal;
- 8) Pembangunan sentra IKM belum terintegrasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 9) Kurangnya edukasi konsumen dan pedagang tentang perdagangan berkelanjutan;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- 1) Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah dan di pasar rakyat;

- 2) Rendahnya pemanfaatan energi bersih dan efisiensi energi oleh pelaku IKM;
- 3) Ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah serta belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
- 4) Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pendampingan akses kemitraan UMKM dengan toko modern;
- 5) Rantai pasok barang pokok dan barang penting yang belum terorganisir;
- 6) Kurangnya fasilitas dasar dan standar teknis di pasar tradisional;
- 7) Terbatasnya akses informasi, teknologi, dan sertifikasi produk;
- 8) Perencanaan pembangunan sentra IKM belum mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan secara komprehensif;
- 9) Rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha serta masyarakat tentang prinsip perdagangan berkelanjutan;

Dampak yang mungkin dapat timbul dengan adanya permasalahan dan hambatan diatas adalah tidak maksimalnya pencapaian misi “Mewujudkan perekonomian daerah yang maju” karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkontribusi dalam peningkatan sektor perdagangan dan industri.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

- 1) Kosongnya beberapa jabatan structural dan fungsional koordinator pada bidang teknis mempengaruhi jalannya pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 2) Besarnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) pada tera/tera ulang;
- 3) Adanya program Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi yang bisa dijadikan alternative usulan penambahan anggaran;

Formulasi rekomendasi tindaklanjut isu-isu strategis lingkup perdagangan dan industri yang sesuai dengan tupoksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain:

- 1) Peningkatan sampah limbah padat dan kemasan dari pusat perdagangan dan pasar rakyat;
 - a) Sistem pengelolaan sampah mandiri di pasar
 - b) Edukasi pedagang dan konsumen
 - c) Kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah

- 2) Penggunaan Energi untuk pengurangan emisi dalam proses produksi industri kecil dan menengah (IKM);
 - a) Sosialisasi terkait upgrading teknologi
 - b) Pemanfaatan energi terbarukan
 - c) Manajemen Energi dan Digitalisasi
- 3) Penggunaan bahan baku industri pengolahan;
 - a) Sosialisasi terkait substitusi bahan baku lokal
 - b) Sertifikasi/Standarisasi bahan baku
 - c) Fasilitasi bahan baku industri pengolahan
- 4) Penataan, pembinaan dan pendampingan akses kemitraan usaha mikro dengan pasar modern;
 - a) Menyusun Perbup Penataan dan Pembinaan toko modern
 - b) Standarisasi produk
 - c) Pendampingan kemitraan UMKM dengan toko modern
- 5) Distribusi barang kebutuhan pokok belum merata;
 - a) Optimasi logistik dan titik distribusi
 - b) Pendanaan dan subsidi transportasi
 - c) Koordinasi pemerintah dan pelaku usaha
- 6) Minimnya pasar bersih dan berstandar SNI yang mendukung sanitasi dan pengelolaan limbah
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
 - b) Menyusun Standar operasional pasar
 - c) Pengawasan dan evaluasi
- 7) Lemahnya daya saing ekspor produk industri lokal;
 - a) Peningkatan mutu dan desain produk
 - b) Pendampingan marketplace
 - c) Promosi dan akses pasar
- 8) Pembangunan sentra IKM belum terintegrasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - a) Menyusun Sentra IKM
 - b) Pembinaan berkelanjutan IKM
 - c) Penyediaan sarana prasarana dan alat produksi pada sentra IKM
- 9) Kurangnya edukasi konsumen dan pedagang tentang perdagangan berkelanjutan;
 - a) Sosialisasi perlindungan konsumen
 - b) Koordinasi dengan instansi lain terkait

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review antara Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2026 dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026. Reviu yang dilaksanakan mencakup semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan Tahun 2026. Setelah melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan para pemangku kepentingan baik antar Dinas maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Terdapat perbedaan alokasi anggaran antara Rancangan Akhir RKPD dan Rancangan Akhir Renja dikarenakan Ketika proses perumusan RKPD berlangsung, prioritas pembangunan bisa mengalami perubahan. Pada tahap awal, estimasi anggaran didasarkan pada asumsi prioritas yang mungkin berubah ketika mendekati tahap akhir. Perubahan ini dapat menyebabkan penyesuaian besaran anggaran berdasarkan kebutuhan.

Selain itu Pada tahap rancangan awal, informasi mengenai ketersediaan sumber daya keuangan dan non-keuangan (misalnya dana transfer dari pemerintah pusat, pinjaman, atau dana swasta) belum dapat dipastikan. Akan Tetapi pada tahap akhir dapat disesuaikan dengan sumber daya yang sebenarnya tersedia. Selama proses penyusunan RKPD, program dan kegiatan di evaluasi lebih lanjut untuk menilai kelayakan teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan. Hasil evaluasi ini dapat mempengaruhi alokasi anggaran pada tahap akhir jika ada kebutuhan untuk menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan program prioritas daerah yang diampu oleh masing-masing dinas teknis.

Dengan demikian, perbedaan besaran anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahapan rancangan awal dan rancangan akhir RKPD mencerminkan dinamika proses perencanaan pembangunan yang melibatkan pengkajian lebih mendalam, penyesuaian terhadap perubahan situasi dan prioritas, serta ketersediaan sumber daya yang aktual.

Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat dari table 2.4 berikut:

Table 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN BOGOR

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TAR GET CAPA IAN	PAGU INDIKA TIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARG ET CAPAI AN	KEBUTU HAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERDAGANGA N						URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERDAGANG AN					
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARA N PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	82,7 4	2.873.4 13.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTAR AN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	82,74	2.873.4 13.000
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diawasi	%	90,4 9	885.941 .000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diawasi	%	90,49	885.941 .000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bogor	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Dokumen	65	885.941.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bogor	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Dokumen	65	885.941.000
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase pelaku usaha gudang yang diawasi	%	58,46	379.689.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase pelaku usaha gudang yang diawasi	%	58,46	379.689.000
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Bogor	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi TDG	Dokumen	60	379.689.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Bogor	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi TDG	Dokumen	60	379.689.000
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba		Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	%	83,23	620.158.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba		Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	%	83,23	620.158.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TAR GET CAPA IAN	PAGU INDIKA TIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARG ET CAPAI AN	KEBUTU HAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dalam Negeri						Dalam Negeri					
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bogor	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang terlayani	Dokumen	20	278.438.000	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bogor	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang terlayani	Dokumen	20	278.438.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Bogor	jumlah Pelaku usaha yang di fasilitasi kelengkapan izin STPW dalam negeri	Dokumen	20	341.720.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Bogor	jumlah Pelaku usaha yang di fasilitasi kelengkapan izin STPW dalam negeri	Dokumen	20	341.720.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang terawasi	%	100	443.910.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang terawasi	%	100	443.910.000
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	20	152.501.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	20	152.501.000
	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	Dokumen	5	156.252.000	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	Dokumen	5	156.252.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Bogor	Jumlah pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	Laporan	10	135.157.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Bogor	Jumlah pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	Laporan	10	135.157.000
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase Permohonan SKA yang terlayani tepat waktu	%	100	543.715.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase Permohonan SKA yang terlayani tepat waktu	%	100	543.715.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan	Dokumen	3000	543.715.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan	Dokumen	3000	543.715.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	46,67	12.769.020.980	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	46,67	12.769.020.980
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	16,67	12.217.491.980	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	16,67	12.217.491.980
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	Unit	2	10.447.425.980	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	Unit	2	10.447.425.980
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	1.770.066.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	1.770.066.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	%	62,50	551.529.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	%	62,50	551.529.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	Dokumen	1	317.516.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	Dokumen	1	317.516.000
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	234.013.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	234.013.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	%	100	3.501.803.800	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	%	100	3.501.803.800

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pasar yang terawasi harga barang pokoknya	%	100	288.025.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pasar yang terawasi harga barang pokoknya	%	100	288.025.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	95.181.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	95.181.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	97.502.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	97.502.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	95.342.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	95.342.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	6,2	2.551.333.800	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	6,2	2.551.333.800
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diawasi	Laporan	1	340.575.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diawasi	Laporan	1	340.575.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	1	294.290.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	1	294.290.000
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	jumlah kegiatan bazar murah di kecamatan	Laporan	12	1.916.468.800	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	jumlah kegiatan bazar murah di kecamatan	Laporan	12	1.916.468.800
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase distributor Pupuk bersubsidi yang terawasi	%	72,83	662.445.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase distributor Pupuk bersubsidi yang terawasi	%	72,83	662.445.000
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	1	176.787.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	1	176.787.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bogor	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Laporan	1	185.907.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bogor	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Laporan	1	185.907.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bogor	Jumlah Pupuk dan pestisida Bersubsidi yang tersalurkan	Laporan	1	299.751.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bogor	Jumlah Pupuk dan pestisida Bersubsidi yang tersalurkan	Laporan	1	299.751.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)	USD	#### #### #	3.081.897.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)	USD	##### ##### #	3.081.897.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang	%	7,10	3.081.897.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang	%	7,10	3.081.897.000
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	528.145.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	528.145.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pameran Dagang Lokal	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	5	361.362.000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	5	361.362.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	5	1.650.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	5	1.650.000.000
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Bogor	Jumlah pelaku usaha yang fasilitasi	Pelaku Usaha	30	542.390.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Bogor	Jumlah pelaku usaha yang fasilitasi	Pelaku Usaha	30	542.390.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang bersertifikat	%	100	3.301.570.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang bersertifikat	%	100	3.301.570.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang	%	100	3.301.570.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang	%	100	3.301.570.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bogor	Jumlah alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang	Unit	760.000	2.600.972.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bogor	Jumlah alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang	Unit	760.000	2.600.972.000
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang diawasi	Orang	410	700.598.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang diawasi	Orang	410	700.598.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	%	16,99	554.030.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	%	16,99	554.030.000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	%	17,75	554.030.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	%	17,75	554.030.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	50	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	50	150.000.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	10	190.967.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	10	190.967.000
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	20	213.063.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	20	213.063.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang dibina	%	49,26	2.371.541.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang dibina	%	49,26	2.371.541.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri		Jumlah IKM yang terbina	Pelaku Usaha	1.500	2.371.541.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri		Jumlah IKM yang terbina	Pelaku Usaha	1.500	2.371.541.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen data Sebaran Industri	Dokumen	1	290.770.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen data Sebaran Industri	Dokumen	1	290.770.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Dokumen	1	780.770.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Dokumen	1	780.770.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Menerima Bantuan Sarana Prasarana Industri	Dokumen	1	498.462.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Menerima Bantuan Sarana Prasarana Industri	Dokumen	1	498.462.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Dokumen	1	595.385.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Dokumen	1	595.385.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	206.154.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	206.154.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pertumbuhan pelaku usaha industri	%	3,43	782.382.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pertumbuhan pelaku usaha industri	%	3,43	782.382.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha Industri yang diawasi	%	100	782.382.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha Industri yang diawasi	%	100	782.382.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	jumlah permohonan dokumen rekomendasi yang terlayani	Dokumen	80	383.816.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	jumlah permohonan dokumen rekomendasi yang terlayani	Dokumen	80	383.816.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	398.566.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	398.566.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Peresentase pelaku usaha yang melaporkan informasi industri	%	100	693.402.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Peresentase pelaku usaha yang melaporkan informasi industri	%	100	693.402.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi Industri yang akurat dan mutakhir	%	100	693.402.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi Industri yang akurat dan mutakhir	%	100	693.402.000
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	185.924.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	185.924.000
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Bogor	jumlah pelaku usaha industri yang di fasilitasi	Dokumen	1	198.739.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Bogor	jumlah pelaku usaha industri yang di fasilitasi	Dokumen	1	198.739.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Bogor	jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	308.739.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Bogor	jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	308.739.000
	URUSAN PEMERINTAHAN						URUSAN PEMERINTAHAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai AKIP	Predikat	BB	21.068.855.617	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai AKIP	Predikat	BB	21.068.855.617
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	1.464.043.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	1.464.043.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	298.512.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	298.512.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.156.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.156.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	37.222.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	37.222.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	35.060.000	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	35.060.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	31.860.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	31.860.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	100.682.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	100.682.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	775.551.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	775.551.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	150.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	150.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	100	13.903.945.117	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	100	13.903.945.117
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	13.510.209.117	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	13.510.209.117
				Dokumen						Dokumen		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	232.993.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	232.993.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	56.949.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	56.949.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	25.273.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	25.273.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	25.273.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	25.273.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bogor	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	26.624.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bogor	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	26.624.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	26.624.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	26.624.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TAR GET CAPA IAN	PAGU INDIKA TIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARG ET CAPAI AN	KEBUTU HAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	112.000 .000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	112.000 .000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	1	16.000.0 00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	1	16.000.0 00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	3	16.000.0 00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	3	16.000.0 00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	3	16.000.0 00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	3	16.000.0 00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah padaSKPD	Lapora n	1	16.000.0 00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah padaSKPD	Lapora n	1	16.000.0 00

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	16.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	16.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	16.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	16.000.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	16.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	16.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	452.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	452.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bogor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	60.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bogor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	60.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	165.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	165.000.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	27.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	27.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	100.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	982.346.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	982.346.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.500.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	199.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	199.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	16.624.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	16.624.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bogor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bogor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	25.000.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	150.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	150.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	498.726.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	498.726.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	15.496.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	15.496.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	749.489.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	749.489.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	550.000.000
	Pengadaan Mebel	Kab. Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	33.248.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	33.248.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	99.745.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	99.745.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	66.496.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	66.496.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	1.856.433.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	1.856.433.000

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	432.484.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	432.484.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	432.229.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	432.229.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	991.720.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	991.720.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	1.548.599.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	1.548.599.500

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TAR GET CAPAI AN	PAGU INDIKA TIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARG ET CAPAI AN	KEBUTU HAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	295.993. 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	295.993. 000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	27.624.0 00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	27.624.0 00
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bogor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	33.248.0 00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bogor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	33.248.0 00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	49.872.0 00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	49.872.0 00

N O	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TAR GET CAPAI AN	PAGU INDIKA TIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARG ET CAPAI AN	KEBUTU HAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas	Unit	3	1.141.86 2.500	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas	Unit	3	1.141.86 2.500
						50.997. 915.397						50.997. 915.397

2.5. Penelaahan Urusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupatenn Bogor merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan awal RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kabupaten Bogor yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Pada Forum Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik kegiatan yang bersinggungan dengan instansi lain yang bukan merupakan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum PD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a) RPJPN 2025-2045

Merujuk pada isu dan tantangan pembangunan kedepan dalam dokumen RPJPN Tahun 2026-2045 lingkup urusan perdagangan dan perindustrian telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, akan tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat dimasa depan yang menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Indonesia emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, social, tata kelola, supermasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan social budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembanguana lingkup perdagangan dan perindustrian antara lain:

- 1) Rendahnya tingkat produktifitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat.

Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sector ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pegetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal.

- 2) Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN).

Konidisi ini sangat penting karena untuk mencapai Visi Indonesia Emas tahun 2045 untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan teknologi tinggi.

- 3) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kontribusi paling tinggi pada sector ini adalah penyerapan tenaga kerja, tapi kontribusi terhadap perekonomian relative rendah. Selain itu beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi diantaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerjaa berkeahlian rendah dan juga banyak bergerak di sector bernilai

tambah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi.

b) RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan perkembangan sosial di Indonesia. Dengan populasi yang besar, sumber daya alam yang beragam, serta lokasinya yang strategis di antara pusat-pusat ekonomi nasional, Jawa Barat memiliki potensi yang besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan bagi Indonesia. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat, Provinsi Jawa Barat juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah. Beberapa di antaranya adalah masalah urbanisasi yang tidak terkendali, ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan, degradasi lingkungan, ketahanan pangan, serta perubahan iklim. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai panduan strategis dalam pembangunan wilayah untuk periode 2025-2045. Perencanaan ini menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadikan visi pembangunan Jawa Barat sebagai provinsi maju, berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai tujuan utama. Berikut kasawan strategis Provinsi Jawa Barat:

1) KSP Kawasan Bandung Utara (KBU)

Tujuan pengembangan Kawasan ini adalah untuk mengendalikan ruang di KBU sehingga terjamin pembangunan berkelanjutan.

2) KSP Sukabumi Selatan

Tujuan Pengembangan Kawasan ini adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis perikanan dan pariwisata dengan tetap mempertahankan Kawasan lindung geologi.

KSP Patiban

Tujuan Pengembangan Kawasan ini adalah untuk mengembangkan Kawasan perkotaanbaru yang ramah lingkungan, terintegrasi dengan PKW serta terpadu dengan pelabuhan patiban.

3) KSP Kertajati *Aerocity*

Tujuan Pengembangan Kawasan ini adalah untuk mengembangkan Kawasan perkotaanbaru yang ramah lingkungan, terintegrasi dengan PKW serta terpadu dengan pelabuhan aerocity.

4) KSP Mundu-Losari

Tujuan Pengembangan Kawasan ini adalah untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang di kawasan perbatasan provinsi

Pembangunan di Provinsi Jawa Barat menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta stakeholder terkait. Berbagai aspek pembangunan, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan, menunjukkan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi agar pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan diantara:

1) Aspek Sumber Daya Manusia:

Tingkat pendidikan yang relatif rendah serta derajat kesehatan masyarakat yang tidak merata menjadi perhatian utama. Angka RLS (Rata-rata Lama Sekolah) pada tahun 2023 menunjukkan angka 8,83 tahun, mengindikasikan masih banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Sementara itu, derajat kesehatan masyarakat juga belum merata, menandakan adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

2) Aspek Infrastruktur:

Kualitas infrastruktur yang belum merata, terutama infrastruktur dasar perumahan, permukiman, dan digital, menjadi kendala dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan infrastruktur antarwilayah menimbulkan ketimpangan dalam akses dan pelayanan publik, serta menahan potensi pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah.

3) Aspek Lingkungan Hidup:

Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, ditandai dengan tekanan perubahan iklim yang meningkat, rendahnya ketaatan terhadap tata ruang, dan tingginya kerentanan terhadap bencana, memerlukan upaya perlindungan lingkungan yang lebih serius. Perlunya integrasi antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

4) Aspek Ekonomi:

Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi pada sektor industri pengolahan. Investasi yang tidak merata serta ketimpangan distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

5) Aspek Tata Kelola Pemerintahan:

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal tercermin dari kinerja pelayanan publik yang belum optimal, belum adaptifnya tata kelola pemerintahan terhadap perubahan, serta tingginya tingkat pengangguran dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Diperlukan reformasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan publik serta menangani disparitas sosial-ekonomi yang ada.

Dengan menyadari berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada penguatan kapasitas manusia, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup, sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kolaborasi antarstakeholder dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Berikut isu strategis Provinsi Jawa Barat:

- 1) Green Economy dan Pembangunan Inklusif
- 2) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 3) Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar
- 4) Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 5) Keberlanjutan Penataan Ruang

6) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

c) RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disebut dengan RPJPD merupakan salah satu dari 3 dokumen rencana pembangunan daerah, yang berlaku untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan (Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2026-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka Panjang daerah yang disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan jangka Panjang ini penting adanya sebagai pedoman bagi perencanaan pemabngunan jangka menengah serta jangka pendek.

1) Pengembangan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sector perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan Penjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Sarana perdagangan terbagi ke dalam 10 kategori jenis usaha yang menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun beragam sarana perdagangan sebagai berikut:

No	Jenis Sarana Perdagangan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar Tradisional	Pasar	24	30	30	31	31
2	Rest Area	Unit	-	-	1	1	1
3	Pusat Perbelanjaan	Unit	-	-	-	14	13
4	Supermarket	Unit	-	-	-	12	7
5	Minimarket	Unit	-	-	-	856	1121
6	Agen LPG	Agen	70	70	70	94	117
7	SPBE	Unit	19	19	19	20	21
8	Kios Distributor Pupuk	Unit	7	7	11	10	10
9	Pengecer Pupuk	Unit	85	90	120	120	100
10	SPBU	Unit	115	115	115	115	109

Peranan pasar tradisional dan pasar desa dalam mendukung pencapaian PDRB sangat berpengaruh. Demi mendorong gerakan bela beli produk UMKM/IKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai leading sector pembangunan pasar mendorong masyarakat untuk berbelanja di pasar. Sampai tahun 2022 telah terbangun 31-unit pasar tradisional di 30 Kecamatan.

Selain itu dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar dari perkembangan usaha bidang ritel serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan pedagang pasar tradisional dan warung kelontong, perlu dilakukan penghentian sementara izin usaha toko modern untuk usaha minimarket, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket yang meliputi wilayah 20 kecamatan. Sampai dengan tahun 2022, jumlah minimarket di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 1122 yang tersebar di 40 kecamatan yang terdiri dari Alfamart, Indomart, Alfamidi, 212 Mart, Agrimart, Al-Amin, Biscomart, Bright, Ceriamart, Dan+Dan, Freshmart, Gemilang Mart, Ikhwab Mart, Jaya Wijaya Mart, Muslim Mart, Prima Feshmart, SW-Mart, Teramart, Yomart. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah minimarket terbanyak di atas 50 toko, yaitu Kecamatan Cibinong (126), Cileungsi (84) dan Gunung Putri (88), Bojonggede (77) dan Gunung Sindur (52), selain itu 8 kecamatan

yang memiliki jumlah minimarket paling sedikit dibawah 10 toko yaitu Rancabungur (9), Nanggung (7), Sukamakmur (7), Tanjungsari (6), Tenjolaya (6), Tenjo (1), Sukajaya (1).

Pada tahun 2020 telah dibangun rest area Gunung Mas untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan puncak. Pembangunan rest area ini terealisasi atas kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, PT. Perkebunan Nusantara VIII dan Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Penataan Kawasan Puncak Kabupaten Bogor untuk Penanganan Kawasan Strategis Nasional dengan Nomor: 05/PKS/SJ/2019, 119/18/KB/KS/V/2019, KB/111.5/461/V/2019, dengan luas lahan yang diperuntukan ± 7 Ha dan jumlah kios terbangun sebanyak 448 kios. Pada tahun 2021 pembangunan kios rest area dilanjutkan sebanyak 68 kios, sehingga total kios yang ada di rest area sebanyak 516 kios. Selain mengatur sarana perdagangan, pengawasan pupuk bersubsidi juga menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Agar bisa memenuhi prinsip tersebut, pemerintah terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat eRDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan dengan mengawasi alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui 10 (sepuluh) distributor/agen:

NO	NAMA DISTRIBUTOR	ALAMAT GUDANG	KECAMATAN	KET.
1	Benteng Purwa Putra, PT	Jl. Raya Jasinga Sipak - Kec. Jasinga	Jasinga	Kujang
2	Esandi Bintang Perdana, PT	Jl. Alternatif Transyogi No. 15 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor	Cariu	Kujang
3	Eunice Jaya Abadi, PT	Jl. Raya Leuwiliang RT 02/02 Desa Cibeber 1 Kec. Leuwiliang Kabupaten Bogor	Leuwiliang	Kujang

4	Global Agrima Indonesia, PT	Jl. Raya Tanjungsari Km. 6 Kp. Darma Desa Tanjungrasa Kec. Tanjungsari Kabupaten Bogor	Tanjungsari	Kujang
5	Keluarga Tani, CV	Jl. Mayjen HE Sukma Km. 18 Pasirmuncang Kec. Caringin Kabupaten Bogor	Caringin	Kujang dan Petro
6	Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT (Bandung)	Kp. Bengkok No. 12 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol	Jonggol	Kujang
7	Prakarsa Sentra Utama, PT	Jl. Cilebut Timur No. 10 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja	Sukaraja	Kujang
8	Setia Kaum Tani, CV	Jl. Raya Cemplang RT 23/06 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kabupaten Bogor	ibungbulang	Kujang dan Petro
9	Koperasi Gema Indonesia Maju	Ruko Green Valey Blok C1/7 Desa Sukamantri Kec. Tamansari	Tamansari	Kujang
10	Cariu Agro Naulitua, PT	Jl. Tranyogi Cariu - Cianjur KM 6 Kp. Darma Desa Tanjungrasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor	Tanjungsari	Petro

Selain sarana perdagangan, retribusi pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan. UTTP juga mewujudkan perlindungan terhadap penjual dan pembeli, selain itu Pemerintah juga mendorong terbentuknya 'Daerah Tertib Ukur' dan 'Pasar Tertib Ukur'. Terdapat 6 Pasar yang sudah mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah pusat antara lain Pasar Cariu, Pasar Ciluar, Pasar Jasinga, Pasar Cigudeg dan Pasar Nanggung. Dengan adanya pasar tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan citra daerah daerah bagi masyarakat konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran, mendukung terwujudnya sistem metrologi legal nasional, serta memperkuat

pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dalam sistem pengawasan dan meningkatkan kinerja kemetrolagian secara Nasional.

2) Pengembangan Industri

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Table 3.1

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	82,74	2.873.413.000
		Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya omset penjualan produk ekspor	Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1846000000	3.081.897.000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya industri	Persentase IKM yang dibina	%	49,26	2.371.541.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin	Persentase pertumbuhan pelaku usaha industri	%	3,43	693.402.000
							9.020.253.000

Table 3.2

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	82,74	%	2.873.413.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	46,67	%	12.769.020.980
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	100	%	3.501.803.800

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
		Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya omset penjualan produk ekspor	Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)	1.846.000.000	USD	3.081.897.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Jaminan Kesesuaian alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang bersertifikat	100	%	3.301.570.000
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	16,99	%	609.433.000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya industri	Persentase IKM yang dibina	49,26	%	2.608.695.100
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin	Persentase pertumbuhan pelaku usaha industri	3,43	%	860.620.200
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pelaku usaha yang melaporkan informasi industri	100	%	762.742.200

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
							30.369.195.280

Table 3.3

Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang: tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan	penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;	Bidang Perdagangan - Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok dan Penting
	pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;	
	pengoordinasian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;	
	pemantauan harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;	
	penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;	
	pelaksanaan dan pengoordinasian operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;	
	pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;	
	pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;	
	pengoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer;	
Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang: tentang Pengolahan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi (SRG/RMU) Cariu	Bidang Perdagangan - Sub Koordinator Sarana Distribusi Perdagangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan target Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan dan indikator tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor antara lain:

a) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian dengan indikator:

- 1) Nilai PDRB Perdagangan
- 2) Nilai PDRB Industri Pengolahan

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauhmana ketercapaian target. Sasaran dan indikator sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

a) Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri

- Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri 723.863.667 (milyar/rupee)

b) Meningkatnya nilai ekspor

- Presentase pertumbuhan nilai ekspor 2,35%

c) Terkendalinya stabilitas harga

- Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten 16%
- d) Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan 83,85%
- e) Meningkatnya presentase industri kecil menengah
 - Proporsi Industri Kecil Menengah pada tingkat Kabupaten 98,54

Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat.

Adapun arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Daya Saing Perdagangan Daerah” sebagai berikut:

- a) Identifikasi, pembinaan dan pendampingan kemitraan UMKM dengan toko modern;
- b) Peningkatan pemanfaatan resi Gudang (SRG) untuk Cadangan pangan pemerintah;
- c) Operasi pasar dan pengawasan/distribusi barang pokok dan barang penting;
- d) Promosi dan branding (citra) pelaku usaha bagi Pelaku usaha yang sudah ekspor;
- e) Peningkatan kualitas sentra IKM dari sisi Sarpras, SDM, Diversifikasi produk, Penyesuaian sarana, Sertifikasi Kompetensi, Perluasan akses pasar yang berorientasi ekspor;
- f) Revitalisasi atau pembangunan sarana-prasarana pasar sesuai standar.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Dengan mengacu pada Kepmendagri 050/5889 tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor untuk tahun 2024 telah merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	meningkatnya kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diawasi
0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan TDG	Persentase pelaku usaha gudang yang diawasi
0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan TDG	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi TDG
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang terlayani
0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	terfasilitasinya Pelaku usaha yang mengajukan kelengkapan izin STPW dalam negeri	jumlah Pelaku usaha yang di fasilitasi kelengkapan izin STPW dalam negeri
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang terawasi
0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pelaku usaha yang diperiksa dalam penyimpanan bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
0002	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	Pelaku usaha yang diperiksa terkait Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terawasinya pelaku usaha yang terkait Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)	Persentase Permohonan SKA yang terlayani tepat waktu
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlayaninya Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya Sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun
0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yg difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina
0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina
0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase pasar yang terawasi harga barang pokoknya
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Data Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
	Agen dan Pasar Rakyat		Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu
0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diawasi
0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terdistribusikannya komoditi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan bazar	jumlah kegiatan bazar murah di kecamatan
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Persentase distributor Pupuk bersubsidi yang terawasi
0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	terawasinya pupuk dan pestisida persubsidi yang tersalurkan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi
0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terpantaunya Distribusi Pupuk dan pestisida Bersubsidi	Jumlah Pupuk dan pestisida Bersubsidi yang tersalurkan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya omset penjualan produk ekspor	Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang	persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang
0002	Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
0003	Pameran Dagang Lokal	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal
0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pelaku usaha yang dilakukan peningkatan citra produk	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Jaminan Kesesuaian alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang bersertifikat
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang
0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	terfasilitasinya tera/tera ulang	Jumlah alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang
0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terawasinya pelaku usaha perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang diawasi
0003	Penyidikan Metrologi Legal		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	meningkatnya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri
0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Produk/pelaku usaha yang dilakukan promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya industri	Persentase IKM yang dibina
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembangunan sumber daya Industri	Jumlah IKM yang terbina
0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya data Sebaran Industri	Jumlah Dokumen data Sebaran Industri
0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terbinanya Pelaku usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang Berkualitas	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Industri pada Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Menerima Bantuan Sarana Prasarana Industri
0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelaku usaha industri yang dilakukan pemberdayaan	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina
0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Evaluasi Industri	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin	Persentase pertumbuhan pelaku usaha industri
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Industri	Persentase pelaku usaha Industri yang diawasi
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha industri	jumlah permohonan dokumen rekomendasi yang terlayani
0002	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pelaku usaha yang diawasi dalam Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup izin usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pelaku usaha yang melaporkan informasi industri
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas data dan Informasi Industri	Persentase data dan informasi Industri yang akurat dan mutakhir
0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data industri yang tersedia	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan	tersusunya Informasi industri	jumlah pelaku usaha industri yang di fasilitasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
	Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		
0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	terkumpulnya laporan industri	jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
	URUSAN PEMERINTAHAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Data Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksanakannya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
	Keuangan SKPD		SKPD
0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah
0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu
0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
0002	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya Paket Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR
1	2	3	4
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	dandibayarkan Pajaknya
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
0005	Pemeliharaan Mebel	Terfasilitasinya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terfasilitasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas

Rekapiulasi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dapat dilihat dari table 3.5 berikut:

Table 3.5

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
BIDANG PERDAGANGAN	4	9	19	19.278.360.980
BIDANG TERTIB NIAGA	2	4	11	6.803.373.800
BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	10	3.847.325.000
SEKRETARIAT	1	7	50	21.068.855.617
	10	23	90	50.997.915.397

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4.1 Program/Kegiatan untuk Tahun 2026

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dengan memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan akan dilaksanakan merujuk pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Selain itu Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam perencanaan dokumen Renja Tahun 2026.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan urusan perdagangan dan urusan perindustrian di Kabupaten Bogor oleh. Terdapat 10 Program, 23 kegiatan dan 90 Sub Kegiatan pada Dinas Perdagangan dan perindustrian Tahun 2026 dengan Rencana Anggaran sebesar **Rp.50.997.915.397, - (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)**

Disamping itu, RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran, mulai dari tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran APBD, hingga Rancangan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2026. RKPD juga akan menjadi pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, mulai dari Rencana Bisnis Reformasi Birokrasi, Penetapan Perjanjian Kinerja, penilaian SAKIP, LKPJ. Serta LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 secara substantif disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Penyusunan Rancangan Awal;
- 2) Penyusunan Rancangan;
- 3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 4) Penyusunan Rancangan Akhir;
- 5) Reviu APIP;
- 6) Fasilitasi RKPD oleh Gubernur Jawa Barat; dan
- 7) Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024

RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan seluruh pendekatan perencanaan serta kesesuaian substansi dengan tugas dan fungsi perangkat daerah seperti:

- 1) Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini ditempuh dengan memberikan ruang kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan aspirasi dan memunculkan rasa memiliki hasil pembangunan karena adanya pelibatan dalam perencanaan. Hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Forum-forum yang mengampu pendekatan partisipatif dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD, baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten, serta membuka kesempatan kepada pemangku kepentingan berdasarkan lingkup kewenangan perangkat daerah dalam Forum Perangkat Daerah. Seluruh usulan dalam pendekatan partisipatif diajukan melalui eplanning yaitu SIPD, yang merekan seluruh aktivitas pengusulan, verifikasi dan validasi, serta penetapan menjadi bagian dari rencana kerja perangkat daerah. Diharapkan dalam beberapa cara

penjaringan usulan partisipatif, dapat melibatkan banyak pemangku kepentingan dan menjaring aspirasi tersebut.

2) Pendekatan Teknokratik

Pendekatan ini ditempuh dengan memberikan ruang kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana pembangunan sebagai implementasi dari pelaksanaan kewenangan konkuren daerah berdasarkan pertimbangan akademis, ilmiah dengan berbasis data dukung sektoral. Bentuk nyata dari pelaksanaan pendekatan teknokratik adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil kajian serta hasil pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperoleh rencana yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan pertimbangan akademis dan ilmiah

3) Pendekatan Politis

Pendekatan ini ditempuh sebagai bentuk implementasi dari janji politis kepala daerah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dalam hal penyusunan RKPD Tahun 2026, tidak dilakukan perencanaan dengan pendekatan politis dalam sudut pandang akomodasi janji politik kepala daerah yang harus dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024.

4) Pendekatan Atas Bawah-Bawah Atas (top bottom-bottom up)

Pendekatan ini ditempuh dengan menyelaraskan rencana pembangunan berdasarkan tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Pendekatan ini diwadahi melalui pelaksanaan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, serta kabupaten untuk berpartisipasi memberikan usulan yang dibutuhkan serta mendukung pencapaian target kinerja daerah. Hasil usulan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang sesuai dengan tema, prioritas pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 secara berjenjang akan diakomodir menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan konkuren daerah yang dilaksanakan oleh 32 perangkat daerah non kecamatan, yang didukung dan dikoordinasikan melalui pelaksanaan fungsi

kewilayahan kecamatan, dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Table 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Berdasarkan Renstra tahun 2025-2029

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	82,74	2.873.413.000			83,15	3.160.754.300
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	meningkatnya kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diawasi	%	90,49	885.941.000			91,40	974.535.100
00 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Dokumen	65	885.941.000	Kab. Bogor	APBD	70	974.535.100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan TDG	Persentase pelaku usaha gudang yang diawasi	%	58,46	379.689.000			59,05	417.657.900
00 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan TDG	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi TDG	Dokumen	60	379.689.000	Kab. Bogor	APBD	65	417.657.900
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	%	83,23	620.158.000			84,06	682.173.800
00 01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang terlayani	Dokumen	20	278.438.000	Kab. Bogor	APBD	20	306.281.800
00 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	terfasilitasinya Pelaku usaha yang mengajukan kelengkapan izin STPW dalam negeri	jumlah Pelaku usaha yang di fasilitasi kelengkapan izin STPW dalam negeri	Dokumen	20	341.720.000	Kab. Bogor	APBD	20	375.892.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dalam Negeri									
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang terawasi	%	100	443.910.000			100	488.301.000
0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pelaku usaha yang diperiksa dalam penyimpanan bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	20	152.501.000	Kab. Bogor	APBD	20	167.751.100
0002	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	Pelaku usaha yang diperiksa terkait Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	5	156.252.000	Kab. Bogor	APBD	5	171.877.200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terawasinya pelaku usaha yang terkait Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	Laporan	10	135.157.000	Kab. Bogor	APBD	10	148.672.700
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)	Persentase Permohonan SKA yang terlayani tepat waktu	%	100	543.715.000			100	598.086.500
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlayaninya Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan	Dokumen	3000	543.715.000	Kab. Bogor	APBD	3000	598.086.500
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	46,67	12.769.020.980			56,67	15.535.403.200
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	16,67	12.217.491.980			23,33	14.928.721.300

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya Sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	Unit	2	10.447.425.980	Kab. Bogor	APBD	3	12.981.648.700
00 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yg difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	1.770.066.000	Kab. Bogor	APBD	4	1.947.072.600
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	%	62,50	551.529.000			72,27	606.681.900
00 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	Dokumen	1	317.516.000	Kab. Bogor	APBD	1	349.267.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	234.013.000	Kab. Bogor	APBD	1	257.414.300
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	%	100	3.501.803.800			100	3.851.984.100
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase pasar yang terawasi harga barang pokoknya	%	100	288.025.000			100	316.827.500
00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	95.181.000	Kab. Bogor	APBD	1	104.699.100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	97.502.000	Kab. Bogor	APBD	1	107.252.200
00 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	95.342.000	Kab. Bogor	APBD	1	104.876.200
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	6,2	2.551.333.800			6,1	2.806.467.100
00 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diawasi	Laporan	1	340.575.000	Kab. Bogor	APBD	1	374.632.500

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	1	294.290.000	Kab. Bogor	APBD	1	323.719.000
00 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terdistribusikannya komoditi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan bazar	jumlah kegiatan bazar murah di kecamatan	Laporan	12	1.916.468.800	Kab. Bogor	APBD	12	2.108.115.600
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Persentase distributor Pupuk bersubsidi yang terawasi	%	72,83	662.445.000			73,56	728.689.500
00 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	1	176.787.000	Kab. Bogor	APBD	1	194.465.700
00 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	terawasinya pupuk dan pestisida persubsidi yang tersalurkan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Laporan	1	185.907.000	Kab. Bogor	APBD	1	204.497.700

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terpantaunya Distribusi Pupuk dan pestisida Bersubsidi	Jumlah Pupuk dan pestisida Bersubsidi yang tersalurkan	Laporan	1	299.751.000	Kab. Bogor	APBD	1	329.726.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya omset penjualan produk ekspor	Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1.846.000.000	3.081.897.000			1.849.692.000	3.390.086.700
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang	persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang	%	7,10	3.081.897.000			7,17	3.390.086.700
00 02	Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	528.145.000	Kab. Bogor	APBD	3	580.959.500
00 03	Pameran Dagang Lokal	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	5	361.362.000	Kab. Bogor	APBD	5	397.498.200
00 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	5	1.650.000.000	Kab. Bogor	APBD	5	1.815.000.000
00 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pelaku usaha yang dilakukan peningkatan citra produk	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pelaku Usaha	30	542.390.000	Kab. Bogor	APBD	30	596.629.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Jaminan Kesesuaian alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang bersertifikat	%	100	3.301.570.000			100	3.631.727.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang	%	100	3.301.570.000			100	3.631.727.000
00 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	terfasilitasinya tera/tera ulang	Jumlah alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang	Unit	760.000	2.600.972.000	Kab. Bogor	APBD	770.000	2.861.069.200
00 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terawasinya pelaku usaha perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang diawasi	Orang	410	700.598.000	Kab. Bogor	APBD	420	770.657.800
00 03	Penyidikan Metrologi Legal			Unit						
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	%	16,99	554.030.000			17,07	609.433.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	meningkatnya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	%	17,75	554.030.000			17,93	609.433.000
00 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	50	150.000.000	Kab. Bogor	APBD	50	165.000.000
00 05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Produk/pelaku usaha yang dilakukan promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	10	190.967.000	Kab. Bogor	APBD	10	210.063.700
00 06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	20	213.063.000	Kab. Bogor	APBD	20	234.369.300

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya industri	Persentase IKM yang dibina	%	49,26	2.371.541.000			55,41	2.608.695.100
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembangunan sumber daya Industri	Jumlah IKM yang terbina	Pelaku Usaha	1.500	2.371.541.000			1.500	2.608.695.100
00 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Dokumen						
00 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya data Sebaran Industri	Jumlah Dokumen data Sebaran Industri	Dokumen	1	290.770.000	Kab. Bogor	APBD	1	319.847.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terbinanya Pelaku usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang Berkualitas	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Dokumen	1	780.770.000	Kab. Bogor	APBD	1	858.847.000
00 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Industri pada Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Menerima Bantuan Sarana Prasarana Industri	Dokumen	1	498.462.000	Kab. Bogor	APBD	1	548.308.200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelaku usaha industri yang dilakukan pemberdayaan	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Dokumen	1	595.385.000	Kab. Bogor	APBD	1	654.923.500
00 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Evaluasi Industri	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	206.154.000	Kab. Bogor	APBD	1	226.769.400
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin	Persentase pertumbuhan pelaku usaha industri	%	3,43	782.382.000			3,45	860.620.200
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Industri	Persentase pelaku usaha Industri yang diawasi	%	100	782.382.000			100	860.620.200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayaninya permohonan rekomendasi perizinan usaha industri	jumlah permohonan dokumen rekomendasi yang terlayani	Dokumen	80	383.816.000	Kab. Bogor	APBD	80	422.197.600
00 02	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pelaku usaha yang diawasi dalam Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup izin usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	398.566.000	Kab. Bogor	APBD	35	438.422.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Peresentase pelaku usaha yang melaporkan informasi industri	%	100	693.402.000			100	762.742.200
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas data dan Informasi Industri	Persentase data dan informasi Industri yang akurat dan mutakhir	%	100	693.402.000			100	762.742.200
00 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data industri yang tersedia	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	185.924.000			1	204.516.400
00 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	tersusunya Informasi industri	jumlah pelaku usaha industri yang di fasilitasi	Dokumen	1	198.739.000	Kab. Bogor	APBD	1	218.612.900

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	terkumpulnya laporan industri	jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	308.739.000	Kab. Bogor	APBD	1	339.612.900
	URUSAN PEMERINTAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Predikat	BB	21.068.855.617			BB	22.495.293.800
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	1.464.043.000			100	930.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	298.512.000	Kab. Bogor	APBD	3	230.000.000
00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.156.000	Kab. Bogor	APBD	1	30.000.000
00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	37.222.000	Kab. Bogor	APBD	1	30.000.000
00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	35.060.000	Kab. Bogor	APBD	1	20.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	31.860.000	Kab. Bogor	APBD	1	20.000.000
00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	100.682.000	Kab. Bogor	APBD	12	75.000.000
00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	775.551.000	Kab. Bogor	APBD	1	450.000.000
00 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Data Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	150.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	75.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	100	13.903.945.117			100	15.294.339.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksanakanya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	13.510.209.117	Kab. Bogor	APBD	14	14.861.230.000
00 02				Dokumen						
00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	232.993.000	Kab. Bogor	APBD	1	256.292.300
00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	56.949.000	Kab. Bogor	APBD	1	62.643.900
00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	25.273.000	Kab. Bogor	APBD	1	27.800.300
00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	25.273.000	Kab. Bogor	APBD	1	27.800.300

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	26.624.000	Kab. Bogor	APBD	4	29.286.400
00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	26.624.000	Kab. Bogor	APBD	1	29.286.400
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	112.000.000			100	123.200.000
00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	16.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	17.600.000
00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	16.000.000	Kab. Bogor	APBD	3	17.600.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	16.000.000	Kab. Bogor	APBD	3	17.600.000
00 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	16.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	17.600.000
00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	16.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	17.600.000
00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	16.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	17.600.000
00 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	16.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	17.600.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	452.000.000			100	497.200.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	60.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	66.000.000
00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	165.000.000	Kab. Bogor	APBD	2	181.500.000
00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	27.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	29.700.000
00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	100.000.000	Kab. Bogor	APBD	70	110.000.000
00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	100.000.000	Kab. Bogor	APBD	50	110.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	982.346.000			100	1.080.580.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.500.000	Kab. Bogor	APBD	1	13.750.000
00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	199.000.000	Kab. Bogor	APBD	5	218.900.000
00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	11.000.000
00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	22.000.000
00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	22.000.000
00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	16.624.000	Kab. Bogor	APBD	1	18.286.400
00 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	27.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	150.000.000	Kab. Bogor	APBD	12	165.000.000
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	498.726.000	Kab. Bogor	APBD	4	548.598.600
0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	16.500.000
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	15.496.000	Kab. Bogor	APBD	1	17.045.600
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	749.489.000			100	824.437.900
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	550.000.000	Kab. Bogor	APBD	1	605.000.000
0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	33.248.000	Kab. Bogor	APBD	4	36.572.800

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	99.745.000	Kab. Bogor	APBD	2	109.719.500
00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	66.496.000	Kab. Bogor	APBD	4	73.145.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	1.856.433.000			100	2.042.076.300
00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	432.484.000	Kab. Bogor	APBD	12	475.732.400
00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	432.229.000	Kab. Bogor	APBD	12	475.451.900

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	991.720.000	Kab. Bogor	APBD	12	1.090.892.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	1.548.599.500			100	1.703.459.400
00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	295.993.000	Kab. Bogor	APBD	29	325.592.300
00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	27.624.000	Kab. Bogor	APBD	29	30.386.400

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCAMNE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					VOLUME	ANGGARA N (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARA N (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 05	Pemeliharaan Mebel	Terfasilitasinya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	33.248.000	Kab. Bogor	APBD	10	36.572.800
00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terfasilitasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	49.872.000	Kab. Bogor	APBD	20	54.859.200
00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	3	1.141.862.500	Kab. Bogor	APBD	3	1.256.048.700
						50.997.915.397				56.906.739.600

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan perangkat daerah yang wajib disusun setiap tahun, sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RKPD Tahun 2026, dan termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan pedoman dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan rencana anggaran, dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR,**



ARIF RAHMAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 197507232002121008